

Laporan Kinerja Tahunan

Perangkat Daerah

BPSDM PROVINSI KALBAR

Tahun 2021



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
JL. GUSTI JOHAN IDRUS NO. 12 PONTIANAK
Telp. (0561) 732078 Fax. (0561) 736190
Website : <http://bpsdm.kalbarprov.go.id>**

Februari 2021



PROFESIONAL

INOVATIF

RAMAH

RESPONSIF

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (BPSDM Provinsi Kalbar) Tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap kebijakan, program dan kegiatan inti/prioritas (*core business*) SKPD yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2021, guna mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

Diharapkan agar Laporan Kinerja ini dapat mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh BPSDM Provinsi Kalbar beserta segenap jajarannya. Diharapkan pula agar laporan ini dapat memberikan saran dan pertimbangan yang positif guna mendukung penyempurnaan manajemen dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga prinsip kepemimpinan daerah yang baik (*Good Local Governance*) dapat terwujud secara optimal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai dan mengiringi upaya kita dalam melakukan tugas pengabdian kepada daerah, masyarakat, bangsa dan negara.

Pontianak, 7 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



MARJANI, SE, M.Si

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19660302 198703 1 012

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Tupoksi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	6
5. Sumber Daya Keuangan.....	11
6. Sarana dan Prasarana.....	21
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
A. RENSTRA SKPD BPSDM PROVINSI KALBAR	30
1. Visi	30
2. Misi.....	31
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU.....	32
B. PERJANJIAN KINERJA	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	42
B. REALISASI ANGGARAN	84
BAB IV PENUTUP	86

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2021



PENDAHULUAN

BAB I

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi diyakini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses pembangunan. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan kualitas sumber daya daya aparatur pemerintah yang ada di Indonesia, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Perencanaan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengembangan kompetensi bagi sumber daya aparatur merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang profesional. Program dan kegiatan pengembangan kompetensi tersebut juga dilaksanakan sebagai salah satu upaya upaya pembinaan, agar sumber daya aparatur yang ada dapat menjalankan tugas dengan hasil yang optimal dan berkualitas.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat (BPSDM Provinsi Kalbar) mempunyai tugas untuk membantu Gubernur Kalbar melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPSDM Provinsi Kalbar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas prioritas (*core business*) BPSDM Provinsi Kalbar, serta guna memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP, BPSDM Provinsi Kalbar telah menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021, dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk peningkatan kualitas kinerja BPSDM Provinsi Kalbar dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga disusun dengan mengacu kepada dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 dan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2021. Hal ini dimaksudkan agar keselarasan antara perencanaan yang telah disusun dengan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar selama 1 (satu) tahun anggaran dapat dievaluasi.

2. Susunan Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah BPSDM Provinsi Kalbar dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPSDM Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. **Sekretariat**, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, serta membawahi :

- 1) Kepala Subbagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset; dan
- 2) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur.

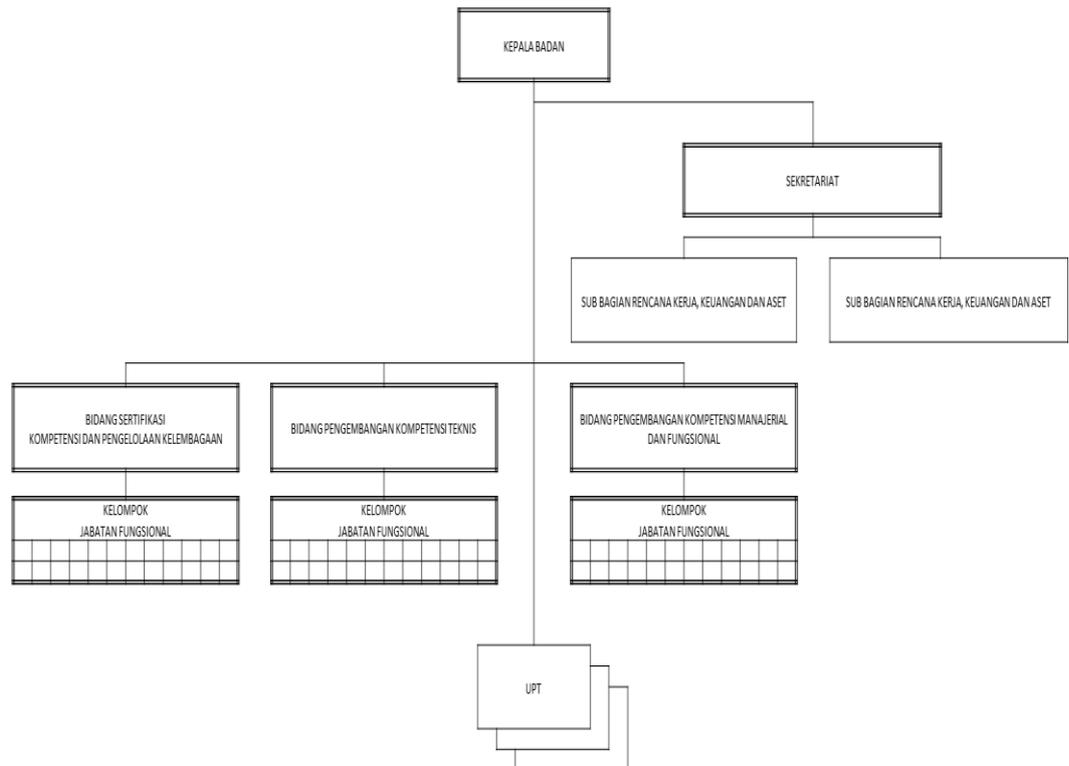


- c. **Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- d. **Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis**, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- e. **Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- f. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**, yang dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan penunjang teknis Badan. Diinformasikan bahwa sampai laporan ini diselesaikan penyusunannya, BPSDM belum memiliki UPT.
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional**, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Diinformasikan bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2021, di BPSDM telah memiliki 3 (tiga) jenis Jabatan Fungsional, yaitu :
 - 1) Jabatan Fungsional Widyaiswara
 - 2) Jabatan Fungsional Nutrisionis
 - 3) Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

Sedangkan bagan struktur organisasi perangkat daerah BPSDM Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :



Bagan I.1 Struktur Organisasi BPSDM Provinsi Kalbar



3. Tupoksi

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, BPSDM Provinsi Kalbar mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPSDM Provinsi Kalbar mempunyai fungsi :

- Perumusan program kerja di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia;



- d. Penyelenggaraan kegiatan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- g. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPSDM;
- h. Pelaksanaan administrasi BPSDM;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas pokok yang dibebankan kepada seluruh jajaran BPSDM Provinsi Kalbar dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Badan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan BPSDM.

c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengendalian mutu, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi, pengelolaan sumber belajar dan kerjasama serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan.



d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi, pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi, dan pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengembangan kompetensi teknis.

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, pengembangan kompetensi pejabat fungsional dan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi di bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BPSDM Provinsi Kalbar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Sampai dengan dokumen ini diselesaikan penyusunannya, BPSDM Provinsi Kalbar memiliki 101 orang pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.1
Data Pegawai di Lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar Berdasarkan Jenis Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	ASN yang berstatus PNS	48	33	81
2.	Non PNS (PTT)	13	7	20



a. Data ASN yang berstatus PNS

PNS yang ada di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, yaitu Kepala BPSDM Provinsi Kalbar.
2. Jabatan Administrasi, yang terdiri dari :
 - a. Jabatan Administrator
 - b. Jabatan Pengawas
 - c. Jabatan Pelaksana
3. jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari :
 - a. Widyaiswara
 - b. Nutrisionis
 - c. Analis Kepegawaian dan Analis Kebijakan

Adapun data dan informasi mengenai PNS di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar digambarkan pada tabel berikut :

1. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan

Tabel I.2
Data PNS di Lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jenis Kepegawaian	Jumlah (Orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	Doktor (S3)	1	2	3
2.	Magister (S2)	17	9	26
3.	Sarjana (S1)	9	15	24
4.	Diploma 4	1	2	3
5.	Diploma 3	2	1	3
6.	SLTA	17	4	21
7.	SD	1	0	1
Jumlah Keseluruhan		48	33	81



2. Jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan

Tabel I.3
Data PNS di Lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	0	2
2.	Pembina Utama Muda (IV/c)	5	3	8
3.	Pembina Tingkat I (IV/b)	7	2	9
4.	Pembina (IV/a)	1	5	6
5.	Penata Tingkat I (III/d)	4	5	9
6.	Penata (III/c)	3	7	10
7.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7	6	13
8.	Penata Muda (III/a)	2	3	5
9.	Pengatur Tingkat I (II/d)	9	1	10
10.	Pengatur (II/c)	6	1	7
11.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	0	1
12.	Juru (I/c)	1	0	1
Jumlah Keseluruhan		48	33	81

3. Jumlah PNS berdasarkan jabatan

Tabel I.4
Data PNS di Lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar
Berdasarkan jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
A.	JPT Pratama	1	0	1
1.	Kepala Badan	1	0	1
B.	Jabatan Administrasi	29	21	50
1.	Jabatan Administrator (Sekretaris dan Kepala Bidang)	1	3	4
2.	Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang)	1	1	2
3.	Pelaksana (Fungsional Umum)	27	17	44
C.	Jabatan Fungsional Tertentu	18	12	30
4.	Widyaiswara	13	6	19
5.	Analisis Kepegawaian	3	4	7
6.	Nutrisionis	0	1	1
7.	Analisis Kebijakan	2	1	3
Jumlah Keseluruhan		48	33	81



Diinformasikan bahwa terkait dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, pada tanggal 31 Desember 2021 telah dilaksanakan Pelantikan Para Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 821.29/301/BKD-B TAHUN 2021 tentang Pengangkatan Penyetaraan Dari Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun data jabatan dan pejabat administrasi di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

Tabel I.5
Data Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
Lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Nomenklatur Jabatan Baru	Nomenklatur Jabatan Administrasi sebelum Penyetaraan
1	2	3
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (atas nama Eva Yuliantika Sandohilpha., S.STP,MPA)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan Dan Tenaga Pengembangan Kompetensi
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (atas nama Prasetyo Tri Sejati, S.STP, MM)	Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan (atas nama Aji Rio Sutrisno, S.Kom, MT)	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar Dan Kerjasama
4.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (atas nama Riko Juliadi, S.STP, M.Sc)	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Dan Prajabatan
5.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (atas nama Syafaral Qutbi, S.Sos)	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Dan Jabatan Pimpinan Tinggi
6.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (atas nama Yunita Harahap, SH)	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional



No.	Nomenklatur Jabatan Baru	Nomenklatur Jabatan Administrasi sebelum Penyetaraan
1	2	3
7.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (atas nama Grina Tri Purnatasari, S.Gz)	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum Dan Pilihan Jabatan Administrasi
8.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (atas nama Dhana Aryana, S.STP, M.AP)	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi
9.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (atas nama Aries Hadiawati (Riris), S.STP, M.AP)	Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang

4. Jabatan Fungsional Widyaiswara

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk membantu gubernur melaksanakan tugas-tugas terkait pengembangan sumber daya manusia, tenaga pengajar atau Widyaiswara merupakan salah satu faktor pendukung yang cukup penting dalam mendukung keberhasilan BPSDM untuk mengoptimalkan potensi dan kompetensi sumber daya aparatur di Provinsi Kalbar. Adapun data jumlah Pejabat Fungsional Widyaiswara yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar adalah sebagai berikut :

Tabel I.6
Data Pejabat Fungsional Widyaiswara di Lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Jabatan	Jumlah (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	Widyaiswara Ahli Utama	3	1	4
2.	Widyaiswara Ahli Madya	9	5	14
3.	Widyaiswara Ahli Muda	1	0	1
Jumlah Keseluruhan		13	6	19

b. Data PTT/Tenaga Kontrak

Adapun data PTT/tenaga kontrak yang dipekerjakan di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar secara ringkas dijelaskan melalui tabel berikut ini :



Tabel I.7

Data PTT/Tenaga Kontrak yang Dipekerjakan di Lingkungan
BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	Satuan Pengamanan	8	0	8
2.	Operator Komputer	3	5	8
3.	Teknisi Listrik	1	0	1
4.	Pramusaji	0	1	1
5.	Tenaga Pelaksana Tufoksi Lainnya	0	1	1
JUMLAH		12	7	19

5. Sumber Daya Keuangan

Secara ringkas, realisasi anggaran belanja dan pendapatan yang dikelola oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada tahun anggaran 2021 dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

Tabel I.8

Realisasi Penyerapan Anggaran Belanja dan Pendapatan
SKPD BPSDM Provinsi Kalbar
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian Jenis Pendapatan dan Belanja	Anggaran		Realisasi Keuangan	
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
I.	Pendapatan	2.793.800.000	883.120.000	685.864.000	77,66
a.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.788.800.000	883.120.000	679.864.000	76,98
b.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000	5.000.000	6.000.000	120,00
II.	Belanja	34.390.175.760	27.637.213.895	25.266.609.416	91,42
a.	Belanja Operasi	32.089.378.450	25.695.903.674	23.347.914.816	90,86
b.	Belanja Modal	2.300.797.310	1.941.310.221	1.918.694.600	98,84

Adapun penjabaran mengenai anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang dikelola oleh BPSDM Provinsi Kalbar Pada Tahun Anggaran 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :



a. Anggaran dan Realisasi Target Pendapatan Tahun Anggaran 2021

Pada awal tahun anggaran 2021 telah ditetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar sebesar **Rp. 2.793.800.000**, sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : DPA/A-1/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Kemudian, pada saat proses perubahan anggaran, telah diusulkan perubahan (pengurangan) besaran target pendapatan menjadi **Rp. 888.120.000,-** atau berkurang sebesar $\pm 68,21\%$ dari target pendapatan yang termuat dalam DPA murni. Hal ini disebabkan adanya kebijakan untuk membatalkan rencana pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas, guna mendukung pembiayaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III yang harus dipindahkan ke Hotel G dan Hotel Borneo, terkait kebijakan Kepala Daerah untuk menggunakan Asrama BPSDM Provinsi Kalbar sebagai tempat karantina para Pekerja Migran Indonesia, yang dipulangkan dari Negara Malaysia guna mengurangi penyebaran Covid-19 yang masih berlangsung selama tahun 2021.

Adapun besaran anggaran dan realisasi pencapaian target pendapatan pada tahun anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.9

Anggaran Dan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan
SKPD BPSDM Provinsi Kalbar
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan	2.793.800.000	883.120.000	685.864.000	77,66
a.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.788.800.000	883.120.000	679.864.000	76,98



No.	Uraian	Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6
c.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000	5.000.000	6.000.000	120,00

Pencapaian target pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pendidikan yang tidak maksimal disebabkan sebagian dari Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dilaksanakan dengan metode *blended learning*, yang menyebabkan besaran setoran berubah dari Rp. 9.296.000,- menjadi Rp. 5.260.000,- (turun \pm 43,42%). Metode *blended learning* adalah metode pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.

Metode Blended Learning dalam Latsar CPNS ini ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), dan langkah ini diambil karena sampai dengan pertengahan tahun 2021 masih terjadi pandemi covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan besaran setoran ditetapkan sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Setoran yang ditentukan oleh LAN-RI sebesar Rp. 5.260.000,-/orang memang belum termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah. Namun dikarenakan pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan metode *blended learning* tidak membutuhkan pembiayaan yang besar seperti pelatihan dengan metode klasikal, maka kebijakan untuk memungut setoran sebesar Rp. 5.260.000,- dengan besaran tarif yang diatur dalam Peraturan LAN Nomor 3 Tahun 2021.

b. Anggaran dan Realisasi Penyerapan Belanja Tahun Anggaran 2021

Sebagaimana telah direncanakan melalui dokumen perencanaan tahunan, pada awal tahun anggaran 2021 telah ditetapkan untuk



melaksanakan 2 (dua) program, 10 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 34.390.175.760,-, yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel I.10
Anggaran Belanja SKPD BPSDM Provinsi Kalbar
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian Jenis Belanja	Besaran Pagu Anggaran (Rp.)
1	2	3
2.	Belanja	34.390.175.760
a.	Belanja Operasi	32.089.378.450
b.	Belanja Modal	2.300.797.310

Anggaran pendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A-1/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Kemudian, sehubungan dengan masih terjadinya pandemi Covid-19, dan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Kalbar, maka pada tahun anggaran 2021 telah dilakukan 2 (dua) kali refocussing/pergeseran anggaran yang mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pergeseran Anggaran Tahap Pertama

Pergeseran anggaran tahap pertama dilakukan dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Gubernur Kalimantan Barat nomor 903/0972/BKAD-B tanggal 17 Maret 2021 tentang Refocussing APBD TA. 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada pergeseran anggaran tahap pertama ini, anggaran belanja yang dialokasikan membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD BPSDM Provinsi Kalbar berkurang dari Rp. 34.390.175.760,- menjadi Rp. 32.701.974.969,- atau ± 4,91% dari total pagu anggaran yang termuat dalam DPA Murni Tahun Anggaran 2021.



Rincian perubahan/pergeseran anggaran belanja tahun anggaran 2021 pada tahap pertama tersebut secara ringkas dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.11

Perubahan Anggaran Belanja SKPD BPSDM Provinsi Kalbar
Tahun Anggaran 2021 (Pergeseran Pertama)

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran		Berkurang	
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Rp.	%
1	2	3	4		
a.	Belanja Operasi	32.089.378.450	30.639.899.668	1.449.478.782	4,52
b.	Belanja Modal	2.300.797.310	2.062.075.301	238.722.009	10,38
Jumlah		34.390.175.760	32.701.974.969	1.688.200.791	4,91

Pada pergeseran tahap pertama ini, terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya, yaitu sub kegiatan *Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga*, yang termuat dalam kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional, pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sub kegiatan ini awalnya dipersiapkan dalam rangka mengikuti Jambore Inovasi Kalimantan Tahun 2021. Namun diambil kebijakan untuk membatalkan pelaksanaan sub kegiatan ini karena sampai dengan bulan April 2021, belum diperoleh informasi mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Daerah (Puslatbang KDOD) atau dahulu dikenal dengan nama Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN).

2. Pergeseran Anggaran Tahap Kedua

Pergeseran anggaran tahap kedua dilakukan berdasarkan hasil rapat evaluasi anggaran antara seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Kalbar, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalbar. Pada tahap ini, pagu anggaran belanja kembali berkurang menjadi



Rp. 27.637.213.895,- (berkurang sebesar \pm 19,64% pagu DPA Murni, atau sebesar \pm 15,49% dari pagu DPPA Pergeseran Pertama).

Rincian perubahan/pergeseran anggaran belanja tahun anggaran 2021 pada tahap pertama tersebut secara ringkas dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.12

Perubahan Anggaran Belanja SKPD BPSDM Provinsi Kalbar
Tahun Anggaran 2021 (Pergeseran Kedua)

No.	Uraian Jenis Belanja	Anggaran		Berkurang	
		Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)	Rp.	%
1	2	3	4		
a.	Belanja Operasi	32.089.378.450	25.695.903.674	6.393.474.776	19,92
b.	Belanja Modal	2.300.797.310	1.941.310.221	359.487.089	15,62
Jumlah		34.390.175.760	27.637.213.895	6.752.961.865	19,64

Adapun data realisasi pemanfaatan anggaran belanja tersebut untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2021, secara ringkas dapat dilihat melalui tabel berikut ini :



Tabel I.13
Perubahan Anggaran Belanja Per Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Beserta Realisasi Pemanfaatan Anggaran Tahun 2021
SKPD BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi		
		DPA Murni (Rp.)	DPPA (Perubahan) (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)
				(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.439.202.490	19.868.149.243	18.729.481.888	94,27	99,59
1.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.328.317	46.813.851	42.270.300	90,29	100,00
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.743.988	10.362.022	9.939.400	95,92	100,00
01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.118.527	11.518.527	10.500.400	91,16	100,00
01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.176.563	19.576.563	16.729.100	85,45	100,00
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.289.239	5.356.739	5.101.400	95,23	100,00
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.719.368.098	12.719.368.098	11.989.707.921	94,26	99,99
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.428.215.426	12.428.215.426	11.701.331.504	94,15	100,00
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.720.000	2.720.000	544.517	20,02	75,00
02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	276.240.000	276.240.000	275.640.000	99,78	100,00
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12.192.672	12.192.672	12.191.900	99,99	100,00
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	58.006.455	58.006.455	55.727.482	96,07	100,00
03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	49.000.000	49.000.000	47.072.882	96,07	100,00
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.006.455	9.006.455	8.654.600	96,09	100,00
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	516.453.465	183.015.300	169.864.337	92,81	100,00
05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.306.800	112.069.300	107.628.750	96,04	100,00



No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi		
		DPA Murni (Rp.)	DPPA (Perubahan) (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)
				(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.146.665	0	0,00	0,00	100,00
05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	390.000.000	70.946.000	62.235.587	87,72	100,00
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	854.318.777	626.226.577	495.202.238	79,08	87,05
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.724.255	37.721.785	37.657.000	99,83	100,00
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.612.875	39.131.750	39.085.450	99,88	100,00
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	312.607.030	276.896.870	263.855.460	95,29	100,00
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.380.000	45.324.000	41.304.000	91,13	100,00
06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.557.500	70.178.000	47.483.050	67,66	100,00
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.600.000	33.600.000	27.624.500	82,22	100,00
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.000.000	90.134.172	6.952.778	7,71	10,00
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	38.837.117	33.240.000	31.240.000	93,98	100,00
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.338.877.670	1.966.785.903	1.943.596.600	98,82	100,00
07.05	Pengadaan Mebel	843.146.435	711.639.810	690.171.500	96,98	100,00
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	968.505.375	730.960.233	729.947.400	99,86	100,00
07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	527.225.860	524.185.860	523.477.700	99,86	100,00
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.786.920.108	2.569.179.514	2.340.926.965	91,12	100,00
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.146.639.744	1.040.369.150	847.789.417	81,49	100,00
08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.808.384	72.808.384	71.838.400	98,67	100,00
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.567.471.980	1.456.001.980	1.421.299.148	97,62	100,00
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.079.929.600	1.698.753.545	1.692.186.045	99,61	100,00
09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.430.000	134.351.645	133.756.055	99,56	100,00



No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi		
		DPA Murni (Rp.)	DPPA (Perubahan) (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)
				(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
09.05	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	5.000.000	4.950.000	99,00	100,00
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	287.840.000	156.792.900	155.805.890	99,37	100,00
09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	30.532.800	0	0	0,00	0,00
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.172.390.000	1.136.640.000	1.135.133.000	99,87	100,00
09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	282.736.800	265.969.000	262.541.100	98,71	100,00
B.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.950.973.270	7.769.064.652	6.537.127.528	84,14	94,18
01.	Pengembangan Kompetensi Teknis	3.283.816.481	1.194.406.028	1.109.738.150	92,91	98,81
01.02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	173.930.659	85.198.645	60.749.500	71,30	100,00
01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.946.565.951	979.473.512	932.137.150	95,17	98,55
01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	163.319.871	129.733.871	116.851.500	90,07	100,00
1.02	Sertifikasi, Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	9.667.156.789	6.574.658.624	5.427.389.378	82,55	93,34
02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	232.009.649	232.009.649	145.661.172	62,78	81,25
02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	932.788.415	773.696.565	644.200.246	83,26	100,00
02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	252.987.141	0	0	0,00	0,00



No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi		
		DPA Murni (Rp.)	DPPA (Perubahan) (Rp.)	Keuangan		Fisik (%)
				(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	7.634.743.271	5.033.665.097	4.263.968.760	84,71	92,17
02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	614.628.313	535.287.313	373.559.200	69,79	100,00
Jumlah Keseluruhan		34.390.175.760	27.637.213.895	25.266.609.416	91,42	98,07



6. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab BPSDM Provinsi Kalbar adalah tersedianya aset sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Secara berkala dilakukan upaya optimalisasi aset pendukung yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar, dengan cara melakukan pemeliharaan maupun pengadaan berbagai jenis aset yang dibutuhkan. Optimalisasi aset tersebut juga dilakukan dalam bentuk rehabilitasi terhadap fasilitas yang dimiliki seperti Gedung Kantor (rehab ruang kerja dan pengalihan fungsi ruang tertentu), Aula, Mess/Asrama, dan Plank Nama Kantor. Optimalisasi tersebut juga dilakukan dalam bentuk peningkatan jalan lingkungan, perbaikan atap dan pemasangan canopi.

Aset-aset yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sarana yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar

a) Alat-alat Angkut Darat Bermotor

Terdiri dari kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 3 (tiga) yang masih diperkenankan untuk menjadi aset operasional SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar;

b) Alat-alat Berat

Terdiri dari Mesin Genset/Generator dan Mesin Pompa Air;

c) Peralatan Kantor

Terdiri dari Mesin Absensi Elektronik, Running Text, Mesin Penghisap Debu, Mesin Potong Rumput, Mesin tik manual, Mesin tik listrik, Mesin Penghancur Kertas dan Pemadam Api (Tabung Pemadam Kebakaran);

d) Perlengkapan Kantor

Terdiri dari pendingin ruangan, perlengkapan tempat tidur asrama dan poliklinik, lemari, filling cabinet, brankas, gorden, karpet, lambang garuda, bendera (merah putih dan umbul-umbul), Gambar presiden/Wakil Presiden, Podium, Mimbar, Papan Pengumuman, TV, Whiteboard dan Fiberglass.



e) Komputer dan Perlengkapannya

Terdiri dari Jaringan Internet dan Sistem Informasi, Komputer (PC dan Notebook), Printer dan Scanner, Meja Komputer, Stabilizer, UPS dan *Portal Touchscreen*.

f) Meubelair

Terdiri dari Kursi (kursi kerja, kursi belajar, kursi susun, kursi tamu, kursi makan), meja (meja kerja, meja belajar, meja rapat, meja makan, meja tamu), rak besi, tempat tidur asrama dan poliklinik, rak buku dan rak handuk.

g) Peralatan Dapur

Terdiri dari peralatan masak, kompor gas, tabung gas, lemari es, aqua guard, dispenser, Rak Piring, peralatan makan dan minum.

h) Alat Rumah Tangga

Terdiri dari pendingin ruangan (AC Split dan kipas angin asrama), kursi (kursi lipat, kursi putar dan kursi tamu di asrama), lemari besi, lemari kaca, Rampel Sarung kursi, dan Rampel Taplak Meja.

i) Alat-alat Studio

Terdiri dari Amplifier, Camera Digital, Handy Cam, Keyboard/Organ Tunggal, OHP + layar, LCD (Infokus), Speaker Box, Speaker TOA 20 Watt, DVD Player, Equalizer, Microphone, Megaphone, Rak sound system, dan set peralatan Karaoke.

j) Alat-Alat Kesenian

Terdiri dari alat musik (Gitar, Gendang Berdiri, Gendang Baring, Ketipung, Organ Tunggal, Tambourine, Gong, Organ dan SS, Kariel) dan Tape/DVD Player.

k) Alat-Alat Komunikasi

Terdiri dari *Conference System*, *Expand Card Telephone*, *Faximile*, *Handy Talky*.

l) Instalasi Listrik dan Telepon

Terdiri dari *Instalasi Kabel Power AC*, *Material Instalasi Key Telephone*, *Material Line*, *MDF/ Digital Proprietary Telephone*,



PABX *Digital Super Hybrid*, *Single Line Telephone*, dan Instalasi Jaringan Kabel Listrik.

m) Jaringan Listrik

Terdiri dari jaringan listrik dan peralatan yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas listrik.

n) Peralatan Olahraga

Terdiri dari Treadmill, Sepeda Statis, Orbitrek, *Chess Press Machine*, Kursi *Sit Up*, *Bench Press Machine* dan *Let Pulldown Machine*.

o) Buku Perpustakaan

Terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan umum, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan diklat.

2. *Prasarana yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar*

a) Gedung Utama

Gedung utama memiliki 2 (dua) lantai yang terdiri atas beberapa ruangan, yaitu :

1. Ruang kerja Kepala Badan yang terletak di lantai 2
2. Ruang Kerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis yang terletak di lantai 1.
3. Ruang kerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis yang terletak di lantai 1.
4. Ruang kerja Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan yang terletak di lantai 1.
5. Ruang kerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan yang terletak di lantai 1.
6. Ruang tamu (*Lobby*)
7. Rung Informasi
8. Aula Akcaya yang terletak di lantai 2

b) Gedung Sayap Kiri

Terdiri atas 4 (empat) ruangan, yaitu :

1. Ruang kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur
2. Ruang Tamu



3. Ruang kerja Sekretaris
4. Ruang Tamu Utama (VIP)

c) Gedung Sayap Kanan

Terdiri atas 4 ruangan, yaitu :

1. Ruang kerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
2. Ruang Kerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
3. Ruang Kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset;
4. Laboratorium Komputer
5. Perpustakaan
6. Ruang Poliklinik (ruang kesehatan)

d) Aula

BPSDM Provinsi Kalbar memiliki 2 (dua) aula/gedung/ruang pertemuan, yang pertama adalah AulaBhinneka Tunggal Ika dengan daya tampung maksimal 200 orang. Yang kedua adalah Aula Akcaya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Aula Akcaya ini berada dilantai dua bagian gedung utama dengan daya tampung maksimal 50 orang.

e) Ruang Kelas

BPSDM Provinsi Kalbar memiliki 12 ruangan dengan daya tampung masing-masing kelas sebanyak 40 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel I.14

Ruang Kelas yang Ada pada Komplek Kantor
BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Nama Kelas	Jumlah ruangan
1	2	3
1.	Kelas Tengawang	2 ruang
2.	Kelas Meranti	3 ruang
3.	Kelas Garuda	3 ruang



No.	Nama Kelas	Jumlah ruangan
1	2	3
4.	Kelas Cendana	2 ruang
5.	Kelas Bengkirai	2 ruang

f) Perpustakaan

Perpustakaan yang ada di lingkungan kantor BPSDM Provinsi Kalbar memiliki daya tampung sebanyak 20 orang dan telah memiliki ± 1.200 buah judul buku.

g) Lapangan Parkir dan Garasi

1. Lapangan parkir yang tersedia terdiri atas 4 lokasi, yaitu :

- halaman parkir depan yang diperuntukkan bagi kendaraan roda empat;
- halaman parkir disayap kanan bangunan utama (didepan ruang poliklinik) untuk tamu dan peserta diklat;
- tempat parkir dibelakang gedung sayap kanan untuk kendaraan roda dua;
- tempat parkir di sayap kiri bangunan gedung utama untuk kendaraan roda dua.

2. Garasi yang diperuntukkan bagi kendaraan dinas/ operasional roda empat.

h) Gedung Asrama

Sebagai sebuah SKPD yang diberikan tugas oleh Gubernur untuk merencanakan, mengelola dan menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, Komplek Kantor BPSDM juga dilengkapi dengan fasilitas berupa Gedung Asrama, dengan perincian sebagai berikut :



Tabel I.15
Asrama yang Ada pada Komplek Kantor
BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Asrama	Jumlah Kamar	Ket.
1	2	3	4
1.	Asrama Khatulistiwa	14 Kamar	Kapasitas ± 30 orang
2.	Asrama Kapuas	25 Kamar	Kapasitas ± 50 orang
3.	Asrama Arwana	3 lantai	Kapasitas ± 80 orang
4.	Asrama Lancang Kuning	3 lantai	Kapasitas ± 80 orang
5.	Asrama Mandau	20 kamar	Kapasitas ± 50 orang

i) Ruang Kerja Widyaiswara

Ruang Kerja Widyaiswara terletak dibagian belakang gedung utama kantor BPSDM Provinsi Kalbar, dan berdekatan dengan ruang kelas.

j) Pendopo

BPSDM Provinsi Kalbar memiliki 2 (dua) buah Pendopo. Pendopo yang pertama terletak di sebelah kiri Aula/Gedung Pertemuan Utama. Pendopo yang kedua terletak di belakang gedung utama kantor BPSDM Provinsi Kalbar.

k) Gudang

Tempat penyimpanan segala barang inventaris kantor yang siap pakai (baru) dengan yang rusak dan keperluan penyelenggaraan pelatihan masih menjadi satu ruangan.

Diakui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana penunjang memberikan pengaruh yang cukup besar didalam keberhasilan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya pengembangan sumber daya manusia. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan penunjang urusan pendidikan dan pelatihan di Provinsi Kalbar, BPSDM Provinsi Kalbar mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pembina penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, serta sesuai dengan perkembangan teknologi dan kondisi kekinian.



Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, dan dibandingkan dengan volume penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar setiap tahunnya, maka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sangat diperlukan guna mengoptimalkan kompetensi SDM pemerintahan daerah yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*)

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar dan tertuang didalam RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 adalah ***masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.***

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Provinsi Kalbar didalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait urusan Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan antara lain :

1. Didalam pelaksanaan upaya pengembangan kompetensi, juga terdapat kendala berupa perbedaan kebijakan yang diterapkan oleh beberapa kementerian/lembaga dengan kebijakan yang terapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya terkait dengan pola pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Hal ini menyebabkan tidak dapat terselenggaranya beberapa kegiatan pengembangan kompetensi tertentu, yang memang dibutuhkan guna mendukung optimalisasi kompetensi pelaksanaan tugas dan fungsi PNS di Provinsi Kalbar.
2. Didalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur dalam bentuk pelatihan, terdapat pembatalan pengiriman peserta untuk beberapa kegiatan pelatihan meskipun penjaringan calon peserta telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak dapat dihindari mengingat pemanggilan calon peserta susulan belum tentu dapat dilakukan dengan cepat, mengingat kesiapan calon peserta cadangan yang kemungkinan tidak dapat mengikuti kegiatan karena telah mendapat penugasan untuk melaksanakan tugas lainnya.



3. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang berjumlah lebih dari 10.000 orang, baik dilihat dari ketersediaan SDM, aset maupun pagu anggaran yang diberikan setiap tahunnya). Karena untuk dapat mengoptimalkan pelayanan publik, serta mengantisipasi rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu untuk mendukung upaya reformasi birokrasi. Sumber daya manusia yang kompeten ini dapat diperoleh melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, yang merupakan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar.



PERENCANAAN KINERJA

BAB II

Upaya peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur merupakan bagian dari perencanaan strategis yang telah disusun oleh Pemerintah daerah, yang diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu wujud nyata dari upaya tersebut adalah dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan kompetensi sumber daya aparatur daerah, dalam bentuk Pelatihan, Bimtek dan Workshop, ataupun kegiatan lainnya yang dipandang. Hal tersebut dipertegas didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengamanatkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa BPSDM Provinsi Kalbar dibentuk dengan tujuan untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengembangan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan. Guna melaksanakan tugas tersebut, telah disusun dokumen-dokumen perencanaan yang merupakan acuan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Dokumen perencanaan tersebut antara lain Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, dan Perjanjian Kinerja (Perjankin).



A. RENSTRA SKPD

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan salah satu media penterjemah perencanaan pembangunan jangka menengah pada tataran Perangkat Daerah, yang memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 disusun dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, yang dipandang akan mampu menunjang pencapaian sasaran-sasaran pembangunan terkait pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalbar. Dokumen Renstra ini juga memuat berbagai program dan kegiatan yang dipandang mampu mengoptimalkan upaya pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah oleh BPSDM Provinsi Kalbar, baik dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pelatihan/diklat, diseminasi, bimbingan teknis (bimtek), *workshop* dan seminar, maupun pelaksanaan kegiatan terikat peningkatan kapasitas pengembangan institusi pengembangan kompetensi.

1. Visi Tahun 2018 – 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah tidak lagi diharuskan untuk memiliki visi dan misi tersendiri yang terkait dengan tugas dan fungsinya, melainkan langsung mendukung upaya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Adapun **visi** yang telah ditetapkan dan ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah :



“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Berdasarkan pernyataan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tersebut, terlihat adanya keterkaitan erat antara tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar dengan Visi yang ditetapkan, terutama pada bagian “Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

Untuk dapat melakukan perbaikan pada tata kelola pemerintahan, hal utama yang dibutuhkan adalah tersedianya sumber daya manusia pemerintahan daerah yang kompeten dan berkualitas, melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi seperti Pelatihan/Diklat, Diseminasi, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Sertifikasi Kompetensi dan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang menjadi tugas dan fungsi utama dibentuknya BPSDM Provinsi Kalbar.

Tugas pengembangan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan daerah tersebut termuat didalam Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.

2. Misi Tahun 2018 – 2023

Sedangkan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar untuk periode tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif
- Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera



Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Terkait dengan penjabaran misi diatas, terdapat 1 (satu) misi yang memiliki keterkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Kalbar, yaitu pada misi kedua :

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance”

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama (IKU)

a. Tujuan Jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, terutama yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar. Penetapan tujuan dalam Renstra BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalbar, yang juga merupakan sasaran yang termuat didalam RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023. Rumusan tujuan dan indikator tujuan inilah yang diperjanjikan oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalbar kepada Gubernur Kalbar untuk dilaksanakan pada tahun berjalan, dan termuat didalam Dokumen Perjanjian Kinerja (Perjanjin) Perangkat Daerah.

Adapun rumusan tujuan yang termuat didalam Renstra BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 adalah ***“Meningkatnya Pengembangan ASN Provinsi Kalbar”***, dengan indikator tujuan adalah ***“Indeks Profesionalitas ASN”***.

Dipandang perlu untuk menyampaikan informasi bahwa pernyataan tujuan jangka menengah dan indikator tujuan sebagaimana dikemukakan diatas merupakan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah diubah/disempurnakan, terkait dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan rumusan tujuan tersebut juga termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 dan Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2021.

Adapun perubahan/penyempurnaan tujuan jangka menengah dan indikator tujuan tersebut secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini :



Tabel II.1
Perubahan/Penyempurnaan Tujuan Jangka Menengah
Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Sasaran RPJMD yang menjadi Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah		Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada RPJMD yang menjadi Indikator Tujuan Perangkat Daerah	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya Pengembangan ASN Provinsi Kalbar	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti Pengembangan Kompetensi.	Indeks Profesionalitas ASN
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengembangan kompetensi.		Indeks kepuasan pelayanan pengembangan kompetensi.	



b. Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh BPSDM Provinsi Kalbar secara nyata, dalam jangka waktu tahunan sampai 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun sasaran strategis yang termuat didalam Renstra BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 adalah **“Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah”**, dengan indikator sasaran **“Persentase Pelayanan Pengembangan Profesionalisme SDM Pemerintah Daerah”**.

Dipandang perlu untuk menyampaikan informasi bahwa pernyataan tujuan jangka menengah dan indikator tujuan sebagaimana dikemukakan diatas merupakan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah diubah/disempurnakan. berdasarkan dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018 – 2023, hanya 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan untuk dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Hal ini terkait dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, dimana berdasarkan peraturan ini Program prioritas (core business) yang menjadi kewenangan BPSDM Provinsi Kalbar untuk mencapai sasaran strategis hanya 1 (satu) program, yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hal inilah yang menjadi dasar dan penyebab mengapa sasaran strategis yang menjadi kewenangan BPSDM Provinsi Kalbar hanya 1 (satu) sasaran strategis.



Tabel II.2
Perubahan/Penyempurnaan Sasaran Strategis
Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar

No.	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah		Indikator Sasaran Perangkat Daerah	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	1. Jumlah SDM Pemerintahan Daerah yang lulus pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional 2. Jumlah SDM Pemerintahan Daerah yang lulus pengembangan kompetensi teknis 3. Jumlah SDM Pemerintahan Daerah yang lulus pengembangan kompetensi tenaga pengembangan kompetensi	Persentase Pelayanan Pengembangan Profesionalisme SDM Pemerintah Daerah
2.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Institusi	-	Akreditasi kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan pengembangan kompetensi.	-



No.	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah		Indikator Sasaran Perangkat Daerah	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	-	Jumlah SDM Aparatur yang memperoleh Sertifikasi Kompetensi	-



B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perubahan Renstra SKPD BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023, telah disusun Renja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2021 dan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2021, yang merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD BPSDM Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2021, dan merupakan bagian dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2021.

Setelah dibahas dan disetujui oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dokumen RAPBD tersebut disahkan menjadi dokumen APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021, dan dilimpahkan kepada BPSDM Provinsi Kalbar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2021. DPA SKPD ini memuat target pendapatan dan anggaran belanja operasi dan belanja modal, yang digunakan untuk membiayai berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan rutin/pendukung, serta program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas (*core business*) yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.

Diinformasikan pula bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat didalam DPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar tidak hanya berdasarkan dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah, tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun berjalan.

Setelah APBD Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan dan disahkan, dan DPA SKPD diserahkan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Langkah selanjutnya adalah penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PERJANKIN), sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP.



Sebagai informasi pendahuluan, dan terkait dengan penjelasan diatas, pada tahun 2021 telah dilakukan 2 (dua) kali penandatanganan dokumen Perjanjian, yaitu :

1. Penandatanganan Perjanjian oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalbar dan Gubernur Kalimantan Barat pada awal tahun anggaran 2021;
2. Penandatanganan Revisi Perjanjian oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalbar dan Gubernur Kalbar, dikarenakan adanya pergantian pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar, dari Bapak Suprianus Herman, SH kepada Bapak Marjani, SE, M.Si.

Adapun target kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
		Indikator	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	14,73%

Perhitungan target kinerja tersebut dilakukan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah target peserta pelatihan tahun 2021 yang termuat dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023}}{\text{Jumlah PNS di Provinsi Kalbar pada tahun 2019 (data tahun dasar pada saat penyusunan Renstra Tahun 2018-2023)}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.594 \text{ orang}}{10.819 \text{ orang}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{14,73\%}
 \end{aligned}$$

Data target peserta pelatihan tahun 2021 yang termuat dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 tidak diubah/disesuaikan dengan kondisi target peserta berdasarkan data refocussing anggaran, karena data ini telah masuk ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, pada bab VIII (Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Permasalahan ini telah pernah dikonsultasikan kepada Tim Penyusunan RPJMD di Bappeda,



namun diarahkan untuk tetap menggunakan besaran target ini demi menjaga konsistensi perencanaan daerah jangka menengah.

Diinformasikan pula bahwa revisi terhadap dokumen ini juga dilakukan dalam rangka menyesuaikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam dokumen Perjankin dengan IKU BPSDM Provinsi Kalbar yang termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023. Hal ini terjadi disebabkan adanya perbedaan antara data besaran target IKU yang telah diusulkan oleh BPSDM Provinsi Kalbar, dengan data besaran target IKU yang harus dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023.

Sedangkan pagu anggaran yang telah dipersiapkan untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut :

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 19.868.149.243	APBD
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 7.769.064.652	APBD
	TOTAL	Rp 27.637.213.895	

Pagu anggaran tersebut adalah pagu anggaran berdasarkan DPPA SKPD BPSDM Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2021 (pergeseran kedua).



AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu kewajiban dari suatu organisasi/instansi pemerintah/Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan secara periodik. Namun, terkait dengan telah ditetapkannya *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*, seluruh perangkat daerah tidak lagi memiliki visi dan misi tersendiri, melainkan langsung mendukung upaya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, terutama yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

Didalam Laporan Kinerja, pertanggungjawaban atas keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut antara lain meliputi pengukuran penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan oleh perangkat daerah secara menyeluruh, periodik dan terpadu. Laporan kinerja juga merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi, sasaran dan tujuan organisasi yang merupakan bagian penting dari visi dan misi suatu organisasi/instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan dengan terlebih dahulu menelaah berbagai dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian, agar diperoleh perhitungan penilaian realisasi capaian kinerja yang tidak hanya berdasarkan hasil



perhitungan aritmatika, tetapi juga memperhatikan hubungan sebab akibat antara sasaran strategis dan program dan kegiatan pendukung yang dilaksanakan.

Dengan melakukan perbandingan antara realisasi capaian kinerja dan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai celah kinerja (*performance gap*) yang nantinya dapat dianalisis, sehingga dapat diperoleh solusi guna penyempurnaan hasil pencapaian target kinerja apabila terdapat realisasi capaian kinerja yang kurang optimal (kurang berhasil).

Adapun kategori pengelompokan skala pengukuran ordinal dari pengukuran capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Kategori Pengukuran Capaian Kinerja

No. Urut	Rentang Capaian	Kategori
1	2	3
1.	Pencapaian lebih dari 90,00%	Sangat Berhasil
2.	Pencapaian antara 70,00% s.d 89,99%	Berhasil
3.	Pencapaian antara 55,00% s.d 69,99%	Cukup Berhasil
4.	Pencapaian kurang dari antara 55,00%	Kurang Berhasil

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa target kinerja yang disusun oleh BPSDM Provinsi Kalbar untuk tahun anggaran 2021 telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perjankin) BPSDM Provinsi Kalbar, yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalbar dan Gubernur Kalimantan Barat.

Dokumen Perjankin ini disusun sebagai tolok ukur pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas (*core business*) pada tahun berkenaan, sekaligus menegaskan kewajiban perangkat daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang telah ditetapkan, agar dapat mencapai hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.



1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	14,73	8,69	59,00%
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					59,00%
Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Cukup Berhasil					

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, perhitungan perbandingan target indikator kinerja ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah **target peserta kegiatan pengembangan kompetensi tahun 2021** dengan data dasar penyusunan indikator kinerja utama untuk sasaran strategis ini, yaitu **jumlah PNS di Provinsi Kalbar pada awal tahun 2019** (data pendukung penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018–2023 dari BKD Provinsi Kalbar). Sedangkan realisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta (alumni) kegiatan pengembangan kompetensi tahun 2021 dengan data dasar sebagaimana dijelaskan diatas.

Adapun rumus perhitungan target kinerja tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah target peserta pelatihan tahun 2021 yang termuat dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023}}{\text{Jumlah PNS di Provinsi Kalbar pada tahun 2019 (data tahun dasar pada saat penyusunan Renstra Tahun 2018-2023)}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.594 \text{ orang}}{10.819 \text{ orang}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{14,73\%}
 \end{aligned}$$



Data target peserta pelatihan tahun 2021 yang termuat dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 tidak diubah/disesuaikan dengan kondisi target peserta berdasarkan data refocussing anggaran dikarenakan data ini telah masuk ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, pada bab VIII (Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah). Hal ini telah pernah dikonsultasikan kepada Tim Penyusunan RPJMD di Bappeda, namun diarahkan untuk tetap menggunakan besaran target ini demi menjaga konsistensi perencanaan daerah jangka menengah.

Sedangkan realisasi pencapaian target kinerja diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah alumni kegiatan pengembangan kompetensi} \\
 & \text{tahun 2021} \\
 = & \frac{\text{Jumlah PNS di Provinsi Kalbar pada tahun 2019 (data tahun} \\
 & \text{dasar pada saat penyusunan Renstra Tahun 2018-2023)} \times 100\% \\
 = & \frac{940 \text{ orang}}{10.819 \text{ orang}} \times 100\% \\
 = & \mathbf{8,69 \text{ \%}}
 \end{aligned}$$

Jumlah alumni kegiatan pengembangan kompetensi tahun 2021 ini diperoleh dari pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah yang masih dapat terlaksana setelah dilakukannya kebijakan refocussing anggaran sebanyak 2 (dua) tahapan. Realisasi pencapaian target peserta kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.3

Rencana dan Realisasi Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah Tahun 2021

No.	Jenis Pengembangan Kompetensi	Peserta Kegiatan Pengembangan Kompetensi		
		Target berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis	775 Orang	340 Orang	21,33



No.	Jenis Pengembangan Kompetensi	Peserta Kegiatan Pengembangan Kompetensi		
		Target berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	819 Orang	600 Orang	37,64
Jumlah Keseluruhan		1.594 Orang	940 Orang	58,97

Diakui bahwa realisasi jumlah peserta pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah untuk tahun 2021 memang kurang optimal, hanya mencapai 58,97% dari total target peserta yang termuat dalam dokumen perencanaan. Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah masih terjadinya pandemi Covid-19, yang menyebabkan adanya kebijakan Refocussing Anggaran, sehingga beberapa jenis kegiatan pengembangan kompetensi harus dibatalkan.

Berdasarkan seluruh pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran ini telah mencapai angka 8,69% atau 59,00% dari target IKU yang ditetapkan pada tahun 2021 dengan skala pengukuran ordinal **cukup berhasil**.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel III.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)
			Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.769.064.652	6.537.127.528	84,14 %	59,00 %

Tabel III.4 menunjukkan persentase realisasi anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 84,14% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 59,00%.



Diakui bahwa realisasi pencapaian capaian kinerja untuk sasaran strategis ini memang belum maksimal. Hal ini antara lain disebabkan :

1. Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 belum mengakomodir seluruh usulan mengenai perubahan besaran target riil yang seharusnya dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Dokumen tersebut hanya mengakomodir perubahan sasaran dan indikator kinerja utama (IKU), tetapi belum mengakomodir besaran target yang seharusnya akan dicapai pada setiap tahun anggaran (dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023)
2. Karena perubahan besaran target IKU tidak terakomodir mengakibatkan pencapaian keluaran (output) dari beberapa sub kegiatan tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk pengukuran pencapaian target IKU. Hanya terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur perhitungan target IKU, yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, yang termuat dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan, yang termuat dalam kegiatan Sertifikasi Kelembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Sedangkan **5 (lima) sub kegiatan** lain yang mengakomodir upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar **tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan** pencapaian IKU, karena target yang termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018–2023 tersebut bukanlah target yang diusulkan oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada saat proses perubahan, melainkan target awal pada saat penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalbar Tahun



2018-2023 (sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023).

Adapun **5 (lima) sub kegiatan yang tidak dapat diakomodir untuk menjadi tolok ukur perhitungan pencapaian IKU** tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - b. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
 - e. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan
3. Adanya kebijakan refocussing anggaran untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19, yang mengakibatkan cukup banyak kegiatan pengembangan kompetensi yang harus dibatalkan;
4. Terdapat 1 (satu) jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu Pengembangan *kompetensi*



Manajerial JPT Pratama, yang dikarenakan jadwal narasumber dari kementerian/lembaga pada akhir tahun sangat padat dan mengalami perubahan jadwal, sehingga waktu pelaksanaannya akan mendekati akhir bulan Desember yang sulit untuk dilaksanakan

b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program prioritas (*core business*) yang dilaksanakan, dan secara langsung mendukung pencapaian target kinerja ini adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang dilaksanakan terkait dengan telah ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.

Program tersebut memuat 2 (dua) jenis kegiatan dan 7 (tujuh) jenis sub kegiatan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar sebagai pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS

Kegiatan ini memuat berbagai sub kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis bagi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, seperti pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/workshop, dan penyusunan berbagai dokumen pendukung upaya Pengembangan Kompetensi Teknis di Provinsi Kalbar.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 340 orang alumni pengembangan kompetensi teknis dan 4 dokumen pendukung pengembangan kompetensi teknis



Adapun sub kegiatan yang termuat dalam kegiatan ini secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis bagi sumber daya aparatur di Provinsi Kalbar, melalui penyediaan berbagai standar perangkat pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi paska pelatihan untuk kegiatan pelatihan tertentu, guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan pelatihan dimaksud dalam mendukung kualitas pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepada PNS yang telah mengikuti pelatihan dimaksud.

Namun terkait kebijakan refocussing anggaran guna mendukung upaya pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 di Provinsi Kalbar, telah diambil kebijakan untuk membatalkan pencapaian 1 (satu) jenis output kegiatan ini, yaitu Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis. Langkah ini juga diambil dengan pertimbangan prioritas kebutuhan pendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis di Provinsi Kalbar.

Adapun *output* sub kegiatan yang tercapai adalah 4 (empat) jenis kurikulum pelatihan teknis, yaitu :

1. Kurikulum Pelatihan Pengembangan Diri Aparatur (Revisi)
2. Kurikulum Pelatihan Revolusi Mental (Revisi)
3. Kurikulum Pelatihan Manajemen Pengelolaan Kawasan Perbatasan
4. Kurikulum Pelatihan Teknis Manajemen Sekolah



2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan berbagai pelatihan, bimbingan teknis (bimtek) maupun workshop, yang dipandang mampu mendukung upaya peningkatan kompetensi PNS dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Provinsi Kalbar.

Output dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah jumlah alumni Pengembangan Kompetensi Teknis 340 orang, atau terealisasi sebesar 98,55% dari total target alumni sebanyak 345 orang.

Adapun Pelatihan / Bimtek / Workshop Pengembangan Kompetensi Teknis yang termuat dalam sub kegiatan ini, dan telah terlaksana sepanjang tahun 2021 secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Workshop Tenaga Penguji Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Workshop ini merupakan salah satu pelatihan pengembangan kompetensi teknis aparatur, yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan peserta Workshop mengenai tugas-tugas sebagai penguji dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Workshop ini telah diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar dengan jumlah alumni sebanyak 49 orang dari target peserta 55 orang.



b. Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

Bimtek ini merupakan bagian dari pengembangan kompetensi bidang pelayanan umum, yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan para peserta Bimtek mengenai sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik, agar kedepannya Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bimtek ini telah diselenggarakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar dengan jumlah alumni sebanyak 30 orang sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Pelatihan ini merupakan salah satu pelatihan pengembangan kompetensi teknis aparatur, yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan mengenai prosedur, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada lingkup organisasi perangkat daerah.

Pelatihan ini telah diselenggarakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar dengan jumlah alumni sebanyak 29 orang dari target peserta 30 orang.

d. Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Bimtek ini merupakan bagian dari pengembangan kompetensi bidang perencanaan, yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan



pemahaman peserta bimtek dalam menggunakan aplikasi SIPD yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri guna mendukung pelaksanaan pengelolaan perencanaan anggaran daerah.

Penyelenggaraan Bimtek ini terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :

1. Angkatan I (Pertama), dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 15 Juli 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah alumni sebanyak 29 orang dari target peserta sebanyak 30 orang.
2. Angkatan II (Kedua), dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah alumni sebanyak 30 orang sesuai dengan target yang ditetapkan.

e. Pelatihan Pelayanan Prima

Pelatihan ini merupakan bagian dari Pengembangan Kompetensi Bidang Pelayanan Umum, yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan mengenai tata cara pemberian pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalbar.

Pelatihan ini telah diselenggarakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah alumni sebanyak 30 orang sesuai dengan target yang ditetapkan.

f. Pelatihan Tata Naskah Dinas

Pelatihan ini merupakan bagian dari Pengembangan Kompetensi bidang administrasi, yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan mengenai tata cara penyusunan naskah dinas, dengan memanfaatkan



aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), untuk mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan.

Pelatihan ini telah diselenggarakan pada tanggal 27 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah alumni sebanyak 40 orang sesuai dengan target yang ditetapkan.

g. Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pelatihan ini merupakan bagian dari pengembangan kompetensi bidang akuntabilitas kinerja, yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan mengenai penerapan SAKIP di lingkungan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalbar.

Pelatihan ini telah diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah alumni sebanyak 30 orang sesuai dengan target yang ditetapkan.

h. Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Pendidikan

Bimtek ini merupakan bagian dari pengembangan kompetensi bidang pendidikan, yang diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman para peserta Bimtek mengenai tata cara pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan pendidikan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Pelatihan ini telah diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah alumni sebanyak 43 orang dari target peserta 40 orang.

i. Pelatihan Teknik Presentasi

Pelatihan ini diselenggarakan guna meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pemahaman para peserta pelatihan mengenai teknik dan tata cara mempersiapkan pelaksanaan presentasi atau penyampaian materi dihadapan publik, agar materi yang disampaikan benar-benar dapat dipahami oleh penerima materi.

Pelatihan ini telah diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 12 November 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar dengan jumlah alumni sebanyak 29 orang dari target peserta 30 orang.

3. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, melalui pemberian ijin penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis yang akan diselenggarakan di Provinsi Kalbar. Sub kegiatan ini juga mengakomodir pelaksanaan monitoring dan evaluasi (money) terhadap pelatihan teknis yang diselenggarakan di Provinsi Kalbar dalam tahun berjalan.

Output dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Penyelenggara Pelatihan yang difasilitasi ijin penyelenggaraan pelatihannya, sebanyak 1 (satu) dokumen.



Adapun ijin penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis yang telah diterbitkan pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 5
Data Penerbitan Ijin Penyelenggaraan
Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis
Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Pelaksana Pelatihan
1	2	3
1.	Workshop Tenaga Penguji Dalam Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis (PKT) BPSDM Provinsi Kalbar
2.	Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)	Bidang PKT BPSDM Provinsi Kalbar
3.	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Bidang PKT BPSDM Provinsi Kalbar
4.	Pelatihan Membuat Media Pembelajaran Inovatif bagi Penyuluh Pertanian Angkatan I	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pertanian Provinsi Kalbar
5.	Pelatihan Teknik dan Metode Evaluasi Penyuluh Pertanian bagi Aparatur Angkatan I	UPT Diklat Pertanian Provinsi Kalbar
6.	Pelatihan Membuat Media Pembelajaran Inovatif bagi Penyuluh Pertanian Angkatan II	UPT Diklat Pertanian Provinsi Kalbar
7.	Pelatihan Teknik dan Metode Evaluasi Penyuluh Pertanian bagi Aparatur Angkatan II	UPT Diklat Pertanian Provinsi Kalbar
8.	Pelatihan Teknik Penyusunan Program Penyuluh Pertanian Bagi Aparatur	UPT Diklat Pertanian Provinsi Kalbar
9.	Bimtek Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Angkatan I	Bidang PKT BPSDM Provinsi Kalbar
10.	Bimtek SIPD Angkatan II	Bidang PKT BPSDM Provinsi Kalbar
11.	Pelatihan Pelayanan Prima	Bidang PKT BPSDM Provinsi Kalbar
12.	Pelatihan Tata Naskah Dinas	Bidang PKT BPSDM Provinsi Kalbar
13.	Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Pendidikan	Bidang PKT BPSDM Provinsi Kalbar
14.	Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Bidang PKT BPSDM Provinsi Kalbar



No.	Nama Pelatihan	Pelaksana Pelatihan
1	2	3
15.	Pelatihan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sanggau
16	Pelatihan Teknik Presentasi	Bidang PKT BPSDM Provinsi Kalbar

II. KEGIATAN SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL

Kegiatan ini memuat berbagai sub kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional bagi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, seperti pelaksanaan sertifikasi kompetensi PNS, pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/workshop manajerial dan fungsional, dan penyusunan berbagai dokumen pendukung upaya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional di Provinsi Kalbar.

Outcome dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 600 orang alumni Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dan 15 dokumen pendukung Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Adapun sub kegiatan yang termuat dalam kegiatan ini secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sertifikasi Kompetensi adalah proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian Kompetensi oleh Pegawai ASN, yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi dan/atau verifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

Pada tahun 2021 telah direncanakan untuk melaksanakan 3 (tiga) jenis sertifikasi kompetensi, yaitu :

1. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Penyesuaian/ Inpassing bagi para Pejabat Fungsional dan Calon Pejabat



Fungsional Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 di Laboratorium Komputer BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 20 orang.

2. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Calon Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, yang telah dilaksanakan pada tanggal 9, 13 dan 14 Desember 2021, dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 44 orang.
3. Penyelenggaraan Uji Kompetensi dalam rangka Penyetaraan Jabatan Administrasi Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar ke Jabatan Fungsional Pranata Komputer, yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021, dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 1 orang.

Adapun output dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah jumlah peserta Uji Kompetensi sebanyak 65 orang, atau terealisasi sebesar 81,25% dari total target peserta sebanyak 80 orang.

Target sebesar 15 orang tidak tercapai karena uji kompetensi Penyetaraan Jabatan Administrasi Pengawas belum dapat dilaksanakan seluruhnya, disebabkan masih banyaknya instansi pembina jabatan fungsional yang belum memiliki instrumen uji kompetensi untuk penyetaraan jabatan.

2. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar

Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung upaya pengembangan kompetensi sumber daya aparatur di Provinsi Kalbar, melalui pelaksanaan berbagai aktivitas yang dipandang mampu untuk meningkatkan



kapasitas kelembagaan BPSDM Provinsi Kalbar selaku institusi pengembangan kompetensi di Provinsi Kalbar.

Output dari pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) jenis dokumen, 1 (satu) aplikasi dan 200 orang peserta Dialog Interaktif.

Adapun kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021, dan termuat dalam sub kegiatan ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Penyediaan dokumen data pembinaan profesi kewidyaiswaraan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional Widyaiswara melalui penyusunan rencana pengembangan kompetensi, pemetaan spesialisasi kompetensi, dan karir Pejabat Fungsional Widyaiswara, serta evaluasi kinerja mereka.

Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan terhadap para Pejabat Fungsional Widyaiswara agar dapat memiliki karir tertinggi dalam jenjang jabatan fungsional, sehingga mampu memberikan dukungan kepada BPSDM Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan berbagai pelatihan yang bermutu dan menghasilkan alumni yang benar-benar kompeten didalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.

b. Penyediaan 1 (satu) jenis aplikasi pengembangan kompetensi pengembangan kompetensi berbasis e-learning

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah melalui pelatihan dengan metode non klasikal (e-learning) oleh BPSDM Provinsi Kalimantan



Barat. Pelatihan dengan metode ini telah pernah diperkenalkan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2017, namun masih dalam tahap penyempurnaan dan pengembangan.

Selain penyempurnaan sistem e-learning, kegiatan ini juga mengakomodir pengelolaan terhadap website BPSDM Provinsi Kalbar.

c. Penerbitan 2 (dua) edisi Majalah Profesional Diklat Aparatur dalam 1 (satu) tahun

Majalah Profesional Diklat Aparatur merupakan salah satu media informasi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan berbagai kegiatan terkait pengembangan kompetensi ASN, khususnya yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Majalah ini diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu edisi Juni dan Edisi Desember.

d. Penerbitan jurnal ilmiah BPSDM Provinsi Kalbar

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan Pengembangan Profesi Pejabat Fungsional, memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat/saran terhadap suatu permasalahan secara ilmiah dan menyebarkan karya tulis ilmiah melalui publikasi ilmiah. Jurnal Ilmiah ini diterbitkan guna mempublikasikan berbagai artikel terkini dengan ruang lingkup pembahasan tentang ilmu sosial, khususnya penelitian dan perkembangan lainnya di bidang pengembangan SDM, kebijakan dan administrasi publik, yang bersifat terbuka terhadap pendekatan multi dan interdisipliner.



e. Fasilitasi penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Widyaiswara

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi para widyaiswara didalam proses pembuatan KTI, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya.

Diinformasikan bahwa pada tahun 2021 telah dilaksanakan fasilitasi untuk penyusunan dan seminar KTI bagi 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Widyaiswara, yaitu :

1. Dr. Ir. H. Darmawan, M.Sc

KTI yang ditulis oleh Bapak Dr. Ir. H. Darmawan, M.Sc berjudul "*Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat*". KTI ini telah diseminarkan pada tanggal 31 Mei 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar.

2. Ir. Bosman Donald Hutahaean, MM

KTI yang ditulis oleh Bapak Dr. Ir. H. Darmawan, M.Sc berjudul "*Analisis Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Terhadap Perilaku Pegawai Negeri Sipil Pada Masa New Normal (Study Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak)*". KTI ini telah diseminarkan pada tanggal 31 Mei 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar.

f. Penerbitan Leaflet dan Kalender BPSDM Provinsi Kalbar

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan informasi mengenai tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalbar dalam bentuk penyediaan leaflet, kalender, dan Buku Profil BPSDM Provinsi Kalbar.



g. Penyelenggaraan Dialog Interaktif

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peringatan hari ulang tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Kalbar yang ke-64, yang diselenggarakan melalui *zoom meeting* pada tanggal 10 Februari 2021. Adapun tema kegiatan ini adalah “*Inovasi Ditengah Pandemi Covid-19 Mewujudkan Kalimantan Barat Maju*”.

h. Fasilitasi Orasi Ilmiah bagi Widyaiswara

Fasilitasi Orasi Ilmiah bagi Widyaiswara merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara, sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang Pejabat Fungsional Widyaiswara untuk dapat naik ke jenjang jabatan Widyaiswara Ahli Utama. Melalui orasi ilmiah, seorang widyaiswara harus mampu mempertanggungjawabkan profesinya kepada masyarakat melalui kaidah-kaidah akademis yang tertuang dalam sebuah KTI.

Pada tahun 2021, terdapat 3 orang Pejabat Fungsional Widyaiswara yang difasilitasi untuk mengikuti Orasi Ilmiah, yaitu :

1. DR. Sofiati, M.Pd

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang ditulis oleh Ibu Dr. Sofiati, M.Pd berjudul “Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Anti Korupsi (Studi Kasus PNS Pemerintah Kota Pontianak)”.

Yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh proses pelaksanaan orasi ilmiah pada tanggal 29 September 2021, di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Jakarta Pusat.



2. Hot Jungjungan Simamora, SH, MH

KTI yang ditulis oleh Bapak Hot Jungjungan Simamora, SH, MH berjudul *“Good Governance Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan”*.

Diinformasikan bahwa memang pelaksanaan orasi ilmiah yang bersangkutan akan dilaksanakan pada awal tahun 2022, namun sejak tahun 2021 proses untuk pelaksanaan orasi ilmiah bagi yang bersangkutan telah dimulai.

KTI yang ditulis yang bersangkutan tersebut telah selesai di *review* oleh Tim *Reviewer*, dan telah melewati proses sidang tertutup yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 26 dan 27 April 2021. Karya tulis tersebut juga telah dimuat dalam Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 2, No. 3 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia, tinggal menunggu proses akhir, yaitu pelaksanaan Orasi ilmiah yang akan segera diusulkan pada awal tahun 2022.

3. Ir. Bosman Donald Hutahaean, MM

KTI yang ditulis oleh Bapak Ir. Bosman Donald Hutahaean, MM berjudul *“Dampak Modal Insani dan Perubahan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Studi Kasus: Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pajak Daerah dan Bidang Pengawasan dan Penagihan Pajak Daerah)”*.

Diinformasikan bahwa memang pelaksanaan orasi ilmiah yang bersangkutan juga baru akan dilaksanakan pada awal tahun 2022, namun sejak tahun 2021 proses untuk pelaksanaan orasi ilmiah bagi yang bersangkutan telah dimulai.



KTI yang ditulis yang bersangkutan tersebut telah selesai di *review* oleh Tim *Reviewer*, dan telah melewati proses sidang tertutup yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 22 September 2021. KTI tersebut juga telah mendapatkan persetujuan untuk dimuat ke dalam Jurnal Internasional/Jurnal Nasional/Jurnal yang diterbitkan LAN RI/ Jurnal Organisasi Profesi. Namun karena keterbatasan waktu, pengusulan penerbitan KTI tersebut baru akan dimulai pada tahun 2022.

3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mengembangkan kompetensi manajerial dan fungsional ASN di Provinsi Kalbar, melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan, bimbingan teknis (bimtek) maupun workshop Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Output dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah jumlah alumni Pengembangan Kompetensi Teknis 600 orang, atau terealisasi sebesar 92,17% dari total target alumni sebanyak 651 orang.

Target alumni Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional tersebut ditetapkan berdasarkan kemampuan BPSDM Provinsi Kalbar untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, dan pertimbangan adanya kebijakan tertentu yang harus dipenuhi terkait dengan pengembangan kompetensi ASN di daerah.

Adapun kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan pada tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Administrator

Diklat Kepemimpinan Tingkat III atau sekarang lebih dikenal sebagai Pelatihan Struktural kepemimpinan Administrator merupakan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, yang dirancang oleh LAN-RI guna mempersiapkan para Pejabat Administrator dan calon Pejabat Administrator untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar kompetensi manajerial administrator.

Pada tahun 2021, kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 27 November 2021, dengan menggunakan metode *blended learning*, yang memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara *online*/daring (dalam jaringan).

Adapun jumlah alumni pelatihan adalah sebanyak 40 orang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Alumni pelatihan ini adalah para Pejabat Administrator dan calon Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

2. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)

Latsar CPNS merupakan pelatihan dasar yang wajib diikuti oleh seluruh PNS dan merupakan salah satu prasyarat untuk dapat diangkat sebagai PNS.

Pelatihan ini dilaksanakan guna membentuk karakter para CPNS, agar mampu bersikap dan bertindak secara profesional sebagai aparatur pemerintah, dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik di unit kerjanya masing-masing.

Pada tahun 2021 pelatihan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yang dilaksanakan dengan 2 (dua)



jenis metode pembelajaran, yaitu metode klasikal dan metode *blended learning*. Kebijakan untuk melaksanakan sebagian kegiatan Latsar CPNS secara *blended learning* ini diambil guna mendukung upaya Pemerintah Provinsi Kalbar untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.

Jumlah total alumni pelatihan ini sebanyak 480 orang, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahap I

Latsar CPNS tahap I diselenggarakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 6 Juni 2021. Pembelajaran pada tahap I ini dilaksanakan secara klasikal, di BPSDM Provinsi Kalbar.

Alumni Latsar CPNS pada tahap ini adalah CPNS Golongan II, yang berjumlah 80 orang, terdiri dari 51 orang CPNS dari Pemerintah Provinsi Kalbar, 15 orang CPNS dari Pemerintah Kabupaten Sekadau, dan 14 orang CPNS dari Pemerintah Kabupaten Melawi.

b. Tahap II

Latsar CPNS tahap II diselenggarakan pada tanggal 20 April sampai dengan tanggal 10 Juli 2021. Pembelajaran pada tahap I ini dilaksanakan secara klasikal, di Hotel Borneo dan Hotel G Kota Pontianak. Pelaksanaan tahap II ini dilaksanakan di luar Komplek Kantor BPSDM Provinsi Kalbar karena pada saat itu terdapat arahan lisan dari Gubernur Kalbar untuk menggunakan Asrama BPSDM Provinsi Kalbar sebagai tempat karantina para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Alumni Latsar CPNS pada tahap ini adalah CPNS Golongan III, yang berjumlah 119 orang, dan



seluruhnya merupakan CPNS dari Pemerintah Provinsi Kalbar.

c. Tahap III

Latsar CPNS tahap III diselenggarakan pada tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021. Pembelajaran pada tahap III ini dilaksanakan secara klasikal, di BPSDM Provinsi Kalbar.

Alumni Latsar CPNS pada tahap ini adalah CPNS Golongan III, yang berjumlah 80 orang, dan seluruhnya merupakan CPNS dari Pemerintah Provinsi Kalbar.

d. Tahap IV

Latsar CPNS tahap IV diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 6 November 2021. Pembelajaran pada tahap IV ini dilaksanakan dengan metode *blended learning*, dimana seluruh aktivitas pemberian materi, baik secara online/daring maupun secara klasikal dipusatkan di BPSDM Provinsi Kalbar.

Alumni Latsar CPNS pada tahap ini adalah CPNS Golongan III, yang berjumlah 80 orang, dan seluruhnya merupakan CPNS dari Pemerintah Provinsi Kalbar.

e. Tahap V

Latsar CPNS tahap V diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 13 November 2021. Pembelajaran pada tahap V ini dilaksanakan dengan metode *blended learning*, dimana seluruh aktivitas pemberian materi, baik secara *online*/daring maupun secara klasikal dipusatkan di BPSDM Provinsi Kalbar.

Alumni Latsar CPNS pada tahap ini adalah CPNS Golongan III, yang berjumlah 82 orang, terdiri dari 15 orang CPNS dari Pemerintah Provinsi Kalbar, 33 orang CPNS dari Pemerintah Kabupaten Sekadau, 1 orang CPNS dari Pemerintah Kabupaten Landak, 9 orang



CPNS dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, dan 24 orang CPNS dari Pemerintah Kabupaten Melawi.

f. Tahap VI

Latsar CPNS tahap VI diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus sampai dengan tanggal 20 November 2021. Pembelajaran pada tahap VI ini dilaksanakan dengan metode *blended learning*, dimana seluruh aktivitas pemberian materi, baik secara *online*/daring maupun secara klasikal dipusatkan di BPSDM Provinsi Kalbar.

Alumni Latsar CPNS pada tahap ini adalah CPNS Golongan II, yang berjumlah 39 orang, terdiri dari 28 orang CPNS dari Pemerintah Provinsi Kalbar, 4 orang CPNS dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, 6 orang CPNS dari Pemerintah Kabupaten Landak, dan 1 orang CPNS dari Pemerintah Kapuas Hulu.

3. Pengembangan Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pengembangan Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan salah satu upaya bentuk upaya Pemerintah Provinsi Kalbar untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi para pejabat yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

Diinformasikan bahwa pada tahun 2021 kegiatan ini batal dilaksanakan dikarenakan jadwal narasumber dari kementerian/lembaga pada akhir tahun sangat padat, dan mengalami perubahan jadwal sehingga waktu pelaksanaannya akan mendekati akhir bulan desember, sehingga sulit untuk dilaksanakan.



4. Bimbingan Teknis Metode Pembelajaran Bagi Widyaiswara BPSDM Provinsi Kalbar

Bimtek ini merupakan salah satu kegiatan pengembangan kompetensi bagi para Pejabat Fungsional Widyaiswara, yang dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan mereka mengenai metode dan teknik pengajaran, terutama pada saat terjadi kondisi darurat seperti pandemi covid-19, yang mengharuskan para institusi penyelenggara pelatihan mengembangkan bentuk atau metode pembelajaran baru, agar pengembangan kompetensi ASN tetap dapat terlaksana.

Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 16 Februari 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 21 orang.

5. Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Pendidikan Lainnya Bagi Pengawas Sekolah

Pelatihan ini merupakan salah satu kegiatan pengembangan kompetensi bagi para Pejabat Fungsional dalam rumpun pendidikan lainnya, yang dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional yang menjadi tanggungjawabnya.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Pendidikan Lainnya diperuntukkan bagi para Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah di Provinsi Kalbar.

Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 5 April sampai dengan tanggal 9 April 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah alumni sebanyak 30 orang, terdiri dari 7 (tujuh) orang Pengawas Sekolah dari Pemerintah Provinsi Kalbar, 11 orang Pengawas Sekolah dari Pemerintah



Kabupaten Kubu Raya, 10 (sepuluh) orang Pengawas Sekolah dari Pemerintah Kota Pontianak, dan 2 (dua) orang Pengawas Sekolah dari Pemerintah Kota Singkawang.

6. Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Manajemen Bagi Analis Kepegawaian

Pelatihan ini merupakan salah satu kegiatan pengembangan kompetensi bagi para Pejabat Fungsional dalam rumpun manajemen, yang dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas dalam jabatan fungsional yang menjadi tanggungjawabnya.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Rumpun Manajemen ini diperuntukkan bagi para Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian di Provinsi Kalbar.

Bimtek ini dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021 di BPSDM Provinsi Kalbar, dengan jumlah alumni sebanyak 30 orang, terdiri dari 28 orang Analis Kepegawaian dari Pemerintah Provinsi Kalbar, dan 2 (dua) orang Analis Kepegawaian dari Pemerintah Kota Pontianak.

4. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan berbagai kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, melalui pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan,



pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pelatihan pada tahun berjalan.

Output dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 7 jenis dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Kegiatan-kegiatan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Evaluasi Pasca Pelatihan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi manfaat keikutsertaan PNS dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Pada tahun 2021 evaluasi pasca pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dilakukan terhadap para peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan pada tahun 2020.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan Tahun 2021

b. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan teknis dan manajerial fungsional

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan berbagai pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan di Provinsi kalbar, agar dapat diketahui sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pelatihan tersebut.



Pada tahun 2021 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Kalbar dan 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Mempawah.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan teknis dan manajerial fungsional Tahun 2021

c. Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menjaga dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional berjalan sesuai dengan standar, prosedur dan kebijakan terkait yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (pelatihan/ diklat) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan kegiatan penjaminan mutu terhadap pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang diselenggarakan oleh 6 (enam) Pemerintah Kabupaten di Provinsi Kalbar, yaitu Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sambas.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Kabupaten/Kota se-Kalbar Tahun 2021.



d. Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengembangan wawasan terkait penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, yang dilaksanakan di Provinsi Kalbar agar kualitas penyelenggaraan pelatihan dapat lebih ditingkatkan.

Pada tahun 2021, Koordinasi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional telah diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2021, bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPSDM Provinsi Kalbar. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh penyelenggara pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional di Provinsi Kalbar, BKD Provinsi Kalbar dan Biro Organisasi Setda Provinsi Kalbar.

Pertemuan ini juga dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi sekaligus mensosialisasikan penerapan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pengembangan kompetensi PNS di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain acara Koordinasi Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional tersebut, juga telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dan Pelatihan Kepemimpinan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 pada tanggal 15 Desember 2021, bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPSDM Provinsi Kalbar.

Pertemuan ini dilaksanakan guna membahas berbagai persiapan yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan



Dasar CPNS di Provinsi Kalbar pada tahun anggaran 2022.

Adapun Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Tahun 2021.

e. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Teknis

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengembangan wawasan terkait penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis, yang dilaksanakan di Provinsi Kalbar, agar kualitas penyelenggaraan pelatihan dapat lebih ditingkatkan.

Pada tahun 2021, Koordinasi Pengembangan Kompetensi Teknis telah diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2021, bertempat di Aula Bhinneka Tunggal Ika BPSDM Provinsi Kalbar. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh penyelenggara pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis di Provinsi Kalbar.

Pertemuan ini juga dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dan membangun sinergi dengan Perangkat Daerah di Provinsi Kalbar untuk Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS di Provinsi Kalimantan Barat, agar tercipta sinkronisasi pengembangan kompetensi PNS di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Koordinasi dan Pengembangan Wawasan Kompetensi Teknis Tahun 2021.



f. Fasilitasi Pemberian Ijin Pelatihan Manajerial dan Fungsional

Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya menjaga dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional dapat berjalan sesuai dengan standar, prosedur dan kebijakan terkait yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan proses administrasi terkait pemberian ijin penyelenggaraan kegiatan pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional di provinsi Kalimantan barat.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah dapat terjaga dan terus ditingkatkan, guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun ijin penyelenggaraan pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang telah diterbitkan pada tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 6
Data Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Tahun 2021

No.	Nama Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkayang	Pelaksanaan 3 Angkatan Golongan III
2.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Bengkayang	Penambahan I Angkatan Golongan III dan ijin perubahan/ pergeseran jadwal pelaksanaan



No.	Nama Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Keterangan
1	2	3	4
3	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu	Pelaksanaan 3 Angkatan Golongan III dan 1 Angkatan Golongan II
4	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Kayong Utara	Pelaksanaan 1 Angkatan Golongan III, dan 1 Angkatan Golongan II dan III
5.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Ketapang	Pelaksanaan 2 Angkatan Golongan III, dan 1 Angkatan Golongan II dan III
6.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Kubu Raya	Pelaksanaan 2 Angkatan Golongan III, dan 1 Angkatan Golongan II
7.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Landak	Pelaksanaan 3 Angkatan Golongan III
8	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Melawi	Pelaksanaan 1 Angkatan Golongan III, dan 1 Angkatan Golongan II
9.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Mempawah	Pelaksanaan 3 Angkatan Golongan III, dan 1 Angkatan Golongan II dan III
10.	Latsar CPNS	BKPSDM Kota Pontianak	Pelaksanaan 2 Angkatan Golongan III
11.	Latsar CPNS	BKPSDM Kota Pontianak	Ijin perubahan/ pergeseran jadwal pelaksanaan
12.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Sambas	Pelaksanaan 7 Angkatan Golongan III
13.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Sambas	Ijin penambahan pelaksanaan 2 Angkatan Golongan II
14.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Sanggau	Pelaksanaan 3 Angkatan Golongan III, 1 Angkatan Golongan II dan 1 Angkatan Golongan I dan II
15.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Sanggau	Ijin perubahan/ pergeseran jadwal pelaksanaan 1 angkatan Golongan III
16.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Sekadau	Pelaksanaan 3 angkatan Golongan III dan 1 angkatan golongan II dan III
17.	Latsar CPNS	BKPSDM Kota Singkawang	Pelaksanaan 3 angkatan Golongan III dan 1 angkatan golongan II



No.	Nama Pelatihan	Instansi Penyelenggara	Keterangan
1	2	3	4
18.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Sintang	Pelaksanaan 4 angkatan Golongan III dan 1 angkatan golongan II, dan 1 angkatan golongan II dan III
19.	Latsar CPNS	BKPSDM Kabupaten Sintang	Ijin Pengalihan Metode Pembelajaran

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Ijin Pelatihan Manajerial dan Fungsional.

g. Penyusunan Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Provinsi Kalimantan Barat, melalui penyusunan naskah evaluasi akademik untuk 2 (dua) mata pelatihan yang diberikan, yaitu

1. *Agenda Kepemimpinan Kinerja*, yang meliputi :
 - a. Manajemen Perubahan Sektor Publik;
 - b. Kepemimpinan Transformasional;
 - c. Jejaring Kerja;
 - d. Komunikasi Efektif.
2. *Agenda Manajemen Kinerja*, yang meliputi :
 - a. Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Hubungan Kelembagaan;
 - c. Organisasi Digital;
 - d. Manajemen Kinerja;
 - e. Standar Kinerja Pelayanan;
 - f. Manajemen Penganggaran;
 - g. Manajemen Resiko.

Naskah evaluasi akademik ini digunakan sebagai salah satu bahan penilaian mengenai pemahaman peserta pelatihan terhadap kedua mata pelatihan tersebut.



Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Penyusunan Naskah Evaluasi Akademik Pelatihan Kepemimpinan Administrator.

2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2020 DAN 2019)

Sebelum melakukan perbandingan terhadap realisasi capaian kinerja tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya, dipandang perlu untuk menyampaikan informasi bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 adalah program dan kegiatan yang termuat didalam dokumen Renstra Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023, sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Perubahan Renstra SKPD BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2013–2018. Namun perbandingan **sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021** tetap dapat dilakukan meskipun akan terlihat kurang optimal, karena perbedaan antara sasaran strategis yang akan dicapai.

Adapun perbandingan sasaran dan indikator kinerja **sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2019, 2020 dan tahun 2021** tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel III.7
Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan
Tahun-tahun Sebelumnya (Tahun 2019 dan 2020)

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja		
	Sebelum Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	Setelah Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	Sebelum Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	Setelah Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	Tahun-tahun Sebelumnya		Tahun 2021
					2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	persentase pelayanan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	97,84 (24,43% dari target jangka menengah)	20,73 (2,74% dari target jangka menengah)	59,00% (8,69% dari target jangka menengah)



Berdasarkan penjelasan tabel diatas terdapat peningkatan tingkat kinerja pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, meskipun pada tahun anggaran 2021 kembali dilakukan efisiensi anggaran, yang dikenal dengan istilah refocussing anggaran sebanyak 2 (dua) tahapan.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang BPSDM dapat melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga dapat mencapai target dengan lebih baik lagi.

3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :



Tabel III.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021
dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Realisasi			Target 2021
	Sebelum Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	Setelah Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	Sebelum Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	Setelah Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	persentase pelayanan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	24,43%	2,74%	8,69%	14,73%



Diakui bahwa pencapaian target kinerja untuk tahun 2021 memang belum maksimal, sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid-19, yang menyebabkan adanya kebijakan refocussing anggaran, sehingga terdapat beberapa pengembangan kompetensi yang harus dibatalkan

Sedangkan jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah didalam dokumen Renstra Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023, capaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur melalui indikator kinerja utama adalah 8,69% atau 59,00% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2021 sebesar 14,73%.

4) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa faktor penyebab kurang optimalnya pencapaian target untuk sasaran ini pada tahun 2021, yaitu :

1. Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 belum mengakomodir seluruh usulan mengenai perubahan besaran target riil yang seharusnya dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Dokumen tersebut hanya mengakomodir perubahan sasaran dan indikator kinerja utama (IKU), tetapi belum mengakomodir besaran target yang seharusnya akan dicapai pada setiap tahun anggaran (dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023)
2. Karena perubahan besaran target IKU tidak terakomodir mengakibatkan pencapaian keluaran (output) dari beberapa sub kegiatan tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk pengukuran pencapaian target IKU. Hanya terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur perhitungan target IKU, yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan



Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, yang termuat dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;

- b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan, yang termuat dalam kegiatan Sertifikasi Kelembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Sedangkan **5 (lima) sub kegiatan** lain yang mengakomodir upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar **tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan** pencapaian IKU, karena target yang termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018–2023 tersebut bukanlah target yang diusulkan oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada saat proses perubahan, melainkan target awal pada saat penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 (sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023).

Adapun **5 (lima) sub kegiatan yang tidak dapat diakomodir untuk menjadi tolok ukur perhitungan pencapaian IKU** tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota



- d. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
 - e. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan
3. Adanya kebijakan refocussing anggaran untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19, yang mengakibatkan cukup banyak kegiatan pengembangan kompetensi yang harus dibatalkan;
 4. Terdapat 1 (satu) jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu Pengembangan *kompetensi Manajerial JPT Pratama*, yang dikarenakan jadwal narasumber dari kementerian/ lembaga pada akhir tahun sangat padat dan mengalami perubahan jadwal, sehingga waktu pelaksanaannya akan mendekati akhir bulan Desember yang sulit untuk dilaksanakan

Sedangkan faktor pendukung pencapaian sasaran ini, antara lain :

1. Perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah di Provinsi Kalbar dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
2. Adanya inovasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode e-learning yang mulai diperkenalkan secara resmi oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada tahun 2017 yang lalu, sehingga untuk beberapa kegiatan yang memang harus terlaksana dengan pertimbangan kebutuhan daerah dapat terus dilaksanakan, meskipun diakui bahwa metode e-learning ini masih harus terus disempurnakan untuk dapat mencapai hasil maksimal;
3. Dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh jajaran BPSDM Provinsi Kalbar.



B. REALISASI ANGGARAN

Ketersediaan anggaran yang memadai untuk melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur daerah merupakan salah satu faktor pendukung utama pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2021 alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan BPSDM Provinsi Kalbar adalah sebesar Rp. 27.637.213.895,-, yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 25.695.903.674,- dan Belanja Modal sebesar sebesar Rp. 1.941.310.221,-. Anggaran tersebut diperoleh dari APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2021.

Adapun total anggaran dan realisasi Belanja yang dikelola oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada tahun anggaran 2021, secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.9

Anggaran dan Realisasi Belanja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2021

Kode Prog	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.868.149.243	18.729.481.888	94,27
02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.769.064.652	6.537.127.528	84,14
Jumlah Keseluruhan		27.637.213.895	25.266.609.416	91,42

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat 1 (satu) Program, 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan yang merupakan kegiatan prioritas (core business) dari BPSDM Provinsi Kalbar yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian 1 (satu) sasaran strategis RPJMD yang merupakan tujuan Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar.



Total anggaran belanja operasi yang dialokasikan untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan prioritas (*core business*) adalah sebesar Rp. 7.769.064.652,- atau 30,23% dari total belanja operasi yang dikelola oleh BPSDM Provinsi Kalbar sebesar Rp. 25.695.903.674,-.

Adapun rincian pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang termuat dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, beserta realisasi penyerapannya secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 10
Pagu Anggaran dan Realisasi/Penyerapan Anggaran
Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas (*core business*) Tahun Anggaran 2021

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.769.064.652	6.537.127.528	84,14
1.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	1.194.406.028	1.109.738.150	92,91
2	Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6.574.658.624	5.427.389.378	82,55

Sedangkan akuntabilitas keuangan untuk kegiatan dan sub kegiatan prioritas (*core business*) BPSDM Provinsi Kalbar, jika dilihat dari sasaran yang dicapai pada tahun anggaran 2021, secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

Tabel III.11
Realisasi Penyerapan Anggaran yang Mendukung Pencapaian
Sasaran Strategis
Pada Tahun Anggaran 2021

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	7.769.064.652	6.537.127.528	84,14



PENUTUP

BAB IV

Meskipun belum optimal, keberhasilan BPSDM Provinsi Kalbar dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2021 merupakan hasil dari upaya dan peran serta seluruh jajaran di lingkungan BPSDM Provinsi Kalbar, yang secara sinergis terus memberikan dorongan untuk mensukseskan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, untuk mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur di Provinsi Kalimantan Barat. Keberhasilan tersebut juga dapat diwujudkan berkat adanya komitmen dan dukungan dari Pimpinan, yang senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, pada tahun anggaran 2021, BPSDM Provinsi Kalbar telah melaksanakan 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 38 sub kegiatan. Khusus untuk kegiatan dan sub kegiatan prioritas (*core bussiness*) perangkat daerah, pada tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dicapai dengan predikat “**cukup berhasil**”. Capaian kinerja dari sasaran “Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah” adalah sebesar 8,69% atau 59,00% dari target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2021, sebesar 14,73%.



Adapun beberapa faktor penyebab tidak maksimalnya pencapaian sasaran ini adalah :

1. Dokumen RPJMD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 belum mengakomodir seluruh usulan mengenai perubahan besaran target riil yang seharusnya dicapai oleh BPSDM Provinsi Kalbar. Dokumen tersebut hanya mengakomodir perubahan sasaran dan indikator kinerja utama (IKU), tetapi belum mengakomodir besaran target yang seharusnya akan dicapai pada setiap tahun anggaran (dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023).
2. Karena perubahan besaran target IKU tidak terakomodir mengakibatkan pencapaian keluaran (output) dari beberapa sub kegiatan tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk pengukuran pencapaian target IKU. Hanya terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur perhitungan target IKU, yaitu :
 - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum, yang termuat dalam kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan, yang termuat dalam kegiatan Sertifikasi Kelembangan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Sedangkan **5 (lima) sub kegiatan** lain yang mengakomodir upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar **tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan** pencapaian IKU, karena target yang termuat dalam dokumen RPJMD Perubahan Tahun 2018–2023 tersebut bukanlah target yang diusulkan oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada saat proses perubahan, melainkan target awal pada saat penyusunan



dokumen RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023 (sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018–2023).

Adapun **5 (lima) sub kegiatan yang tidak dapat diakomodir untuk menjadi tolok ukur perhitungan pencapaian IKU** tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - b. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - c. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
 - e. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan.
3. Adanya kebijakan refocussing anggaran untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19, yang mengakibatkan cukup banyak kegiatan pengembangan kompetensi yang harus dibatalkan;
 4. Terdapat 1 (satu) jenis kegiatan pengembangan kompetensi yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu Pengembangan kompetensi Manajerial JPT



Pratama, yang dikarenakan jadwal narasumber dari kementerian/lembaga pada akhir tahun sangat padat dan mengalami perubahan jadwal, sehingga waktu pelaksanaannya akan mendekati akhir bulan Desember yang sulit untuk dilaksanakan

Sedangkan faktor pendukung pencapaian sasaran ini, antara lain :

1. Perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah di Provinsi Kalbar dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
2. Adanya inovasi pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode e-learning yang mulai diperkenalkan secara resmi oleh BPSDM Provinsi Kalbar pada tahun 2017 yang lalu, sehingga untuk beberapa kegiatan yang memang harus terlaksana dengan pertimbangan kebutuhan daerah dapat terus dilaksanakan, meskipun diakui bahwa metode e-learning ini masih harus terus disempurnakan untuk dapat mencapai hasil maksimal;
3. Dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh jajaran BPSDM Provinsi Kalbar.

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Perangkat Daerah BPSDM Provinsi Kalbar Tahun 2021 (APBD), dengan harapan agar laporan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, untuk perbaikan di masa akan datang.

Pontianak, 7 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



MARJANI SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660302 198703 1 012



EPDHI
PROVINSI KALBAR

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Tahunan
2021

(APBD)

Formulir Pengukuran Kinerja
Tahun 2021

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Provinsi Kalimantan Barat
 Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	14,73%	8,69%	59,00

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 7.769.064.652
 Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 6.537.127.528

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



MARJANI, SE, M.SI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660302 198703 1 012



EPSCM
PROVINSI KALBAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARJANI, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (EPSCM)
Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LAMPIRAN**
Jabatan :

Selaku pihak kedua, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dan pihak kedua berjanji akan melaksanakan tugas sebagai yang telah ditetapkan dalam lampiran perjanjian ini, dan berjanji akan melaksanakan tugas kinerja tersebut dengan sungguh-sungguh.

Pihak kedua akan melaksanakan tugas kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dan pihak pertama berjanji akan melaksanakan tugas sebagai yang telah ditetapkan dalam lampiran perjanjian ini, dan berjanji akan melaksanakan tugas kinerja tersebut dengan sungguh-sungguh.

(APBD)

Pihak Kedua,
GUSEMUR, KALIMANTAN BARAT

Pihak Pertama,
KEPALA EPSCM
KALIMANTAN BARAT,

*Formulir Perjanjian Kinerja
Tahun 2021*



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Gusti Johan Idrus No. 12 Telp : 732078 Fax : 736190

PONTIANAK

Kode Pos 78121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARJANI, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Provinsi Kalimantan Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Desember 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA BPSDM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MARJANI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660302 198703 1 012

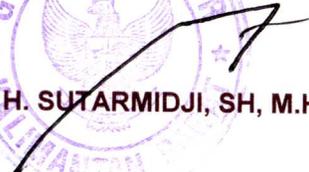
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan pengembangan profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah	persentase pelayanan pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	14,73%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 19.868.149.243	APBD
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 7.769.064.652	APBD
TOTAL	Rp 27.637.213.895	

Pontianak, Desember 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA BPSDM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


MARJANI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660302 198703 1 012